

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Bastian (2010:137-138) Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Terlepas dari kontroversi dan kelemahan yang sangat mendasar. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan pertauran pemerintah.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen, yang ditetapkan melalui keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut diatas, Presiden menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan

Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Keputusan Presiden tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni 2012.

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk memproses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Selain menyusun SAP, KSAP juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman serta informasi lebih lanjut yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan.

2.1.2 Tujuan dan Strategi KSAP

KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan serta pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Dalam mencapai tujuan dimaksud, KSAP mengacu pada praktek-praktek terbaik internasional, yang di antaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) yang diterbitkan oleh *International Federation Of Accountant* (IFAC).

Strategi “adaptasi” memiliki pengertian bahwa pada prinsipnya pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, seperti memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktek-praktek keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transaksi dari dasar kas ke dasar akrual yang disebut *cash towards accrual*. Dengan dasar ini, pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat menurut dasar kas sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat menurut dasar akrual.

Menurut Bastian (2010:138) Proses transisi standar dari dasar kas ke dasar akrual diharapkan selesai pada tahun 2007. Dalam menyusun SAP, KSAP menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh :

- a. *International Federation Of Accountants;*
- b. *International Accounting Standards Committee;*
- c. *Internasional Monetary Funds;*

- d. Ikatan Akuntan Indonesia;
- e. *Federation Accounting Standard Board-USA*;
- f. *Governmental Accounting Standard Board-USA*;
- g. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara;
- h. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi dan audit pemerintahan.

2.1.3 Kedudukan SAP

- a. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menetapkan SAP. Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

2.1.4 Ruang Lingkup SAP

Menurut Bastian (2010:140) SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) oleh Komite.

Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP. Komite Konsultatif lalu mengusulkan draf SAP final kepada Presiden melalui Menteri Keuangan untuk ditetapkankan menjadi Peraturan Pemerintah. Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, selanjutnya SAP dipublikasikan dan di distribusikan kepada publik termasuk masyarakat, institusi, serta perwakilan organisasi. Selain itu, KSAP juga melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan dapat berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan, *training of trainers (TOT)* dan lain-lain. Seluruh draf dan standar, termasuk interpretasi dan buletin teknis diterbitkan oleh KSAP dalam bahasa Indonesia. Proses pengalihan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa lain harus dikonfirmasi kepada KSAP.

2.1.5 Muatan Isi Masing-Masing SAP

a. SAP No 01 – Penyajian Laporan Keuangan.

Standar mencakup pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, basis akuntansi laporan keuangan, informasi yang harus disajikan laporan keuangan utama, serta entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas.

b. SAP No 02 – Laporan Realisasi Anggaran.

Standar mencakup pengertian laporan realisasi anggaran dan tujuan laporan realisasi anggaran. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk

pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. SAP No 03 – Laporan Arus Kas.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa depan, serta berguna untuk menilai kecermatan taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas akuntansi. Dan tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengguna, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara ks pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

d. SAP No 04 – Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya terbatas untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh

karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, laporan keuangan harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi demi memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. SAP No 05 – Akuntansi Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen-bekas. Jika pemerintah memproduksi barang atau perlengkapan sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku membuat alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai akan dicatat sebagai persediaan, seperti alat-alat pertanian setengah jadi. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga pita cukai dan leges (materai), bahan baku, serta barang dalam proses/setengah jadi. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah

mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

f. SAP No 06 – Akuntansi Investasi.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan investasi karena beberapa alasan seperti memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek demi manajemen kas. Ada beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat investasi yang dapat berupa pembelian surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

g. SAP No 07 – Akuntansi Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering menjadi bagian utama dari aset pemerintah sehingga sangat signifikan dalam penyajian neraca. Aset yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalnya, instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor), dan hak atas tanah.

Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap harus diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

h. SAP No 08 – Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehan dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi umumnya memerlukan periode waktu tertentu, yang bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset itu dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pernyataan Standar ini memberikan pedoman untuk :

- a. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
- b. Penetapan biaya yang dikapitalisasi dan disajikan pada neraca; dan
- c. Penetapan dasar pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

i. SAP No 09 – Akuntansi Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan

akuntansi kewajiban pada saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan ke kewajiban tersebut.

- j. SAP No 10 – Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas, dan tidak diharapkan terjadi karena berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

- k. SAP No 11 – Akuntansi Khusus Untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi.

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari semua laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Laporan Keuangan Secara Umum

Menurut Samryn (2017:30-32) Secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. Tiap ikhtisar tersebut dibuat dalam satu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan ini mengikhtisarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Secara Umum

Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas (Samryn, 2017:33). Namun, sejalan maka pelaporan keuangan diperluas dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membuat keputusan investasi dan kredit, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi.
- b. Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang akan datang.
- c. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahan-perubahan di dalamnya. Informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan dapat menjelaskan yang terjadi atas sumber daya tersebut selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.

- d. Melakukan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas para pemilik.
- e. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama.
- f. Menilai likuiditas, solvabilitas dan arus dana. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, jangka panjang dan arus dana.
- g. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen. Manipulasi matematis, atas nilai akun elemen laporan keuangan dapat menunjukkan arah kebijakan dan prestasi manajemen.
- h. Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan.

2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:02) Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap Rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan.

Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu di dukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya, Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingandengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan

secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secarik laporan keuangan publikasian yang terdapat dikoran atau situs pemerintah daerah pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika dilakukan analisis secara lebih seksama. Laporan keuangan publikasian merupakan inti sari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau sakit, kita dapat melihatnya dari laporan keuangannya (Mahmudi, 2016:04)

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik;
2. Untuk alat akuntabilitas publik;
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2.2.5 Tujuan Laporan Keuangan Menurut SAP

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai

tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

2.2.6 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:06) jika laporan keuangan publikasian itu dieksplorasikan dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting di dalamnya. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;
3. Memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;
 - b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan;
 - c. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
 - d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

2.2.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus berupaya memperbaiki kualitatif laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan (*relevance*) artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.

Relevansi laporan keuangan terkait dengan:

- a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi, yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
 - b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.
 - c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
2. Andal (*Reliability*) artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
 - a. Disajikan secara jujur, yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
 - b. Dapat diverifikasi, yaitu penyajian laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.

- c. Netral dalam penyajian, yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*) artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami (*understandability*) artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Triwardana (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan signifikansi 0,003, penerapan sistem keuangan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. SKPD laporan keuangan dengan signifikansi 0,000 dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan signifikansi 0,000. Hasil analisis juga menunjukkan koefisien R square sebesar 94,1%. Setiap variabel independen memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen, artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Semua variabel juga memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen dalam penelitian ini.

Anggelicca (2019), melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah”. Hasil penelitian bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Hasil analisis koefisien determinasi yang menyatakan bahwa sebesar 30,8% perubahan kualitas penyajian laporan keuangan di pengaruhi oleh penerapan SAP.

Oktarina, dkk (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang”. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang. Hasil analisis uji F nilai F sebesar 10,507 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, variabel kualitas aparatur pemerintahan dan good governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Herawati dan Nopianti (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan *Good Governance* memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis bahwa nilai thitung X_1 lebih besar dari nilai ttabel sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan. Atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi dapat di generalisir terhadap seluruh populasi yakni Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Sedangkan X_2 lebih kecil dari nilai ttabel sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah *Good Governance* berpengaruh secara tidak signifikan. Atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi tidak dapat di generalisir terhadap seluruh populasi yakni Pemerintah Daerah di Jawa Barat.

Sako dan Lantowa (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Hasil analisis determinasi menunjukkan

variabel dependen (kualitas laporan keuangan) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penerapan SAP).

Dwitayanti (2019), melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Banyuasin”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang didapat adalah sebagai berikut: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) memiliki nilai signifikansi 0,014 dibawah 0,05, artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hasil analisis nilai signifikansi sebesar 0,014 dibawah 0,05 Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan SAP memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Banyuasin. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,171. Nilai ini berarti bahwa sebesar 17,1% variabel kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Banyuasin dipengaruhi oleh Penerapan SAP, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

2.4 Kerangka Pemikiran

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X), sedangkan variabel dependent adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y), maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Hipotesis Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2015:64). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU.